

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Manusia pada hakikatnya terus mengalami dan merasakan pendidikan, tetapi pada dasarnya tidak semuanya memahami arti pendidikan, pendidik atau mendidik. Istilah pendidikan dapat dimaknai dalam dua kata yaitu "*paedagogie*" (pendidikan) dan "*paedagogiek*" (ilmu pendidikan). Sehingga pedagogic atau ilmu pendidikan merupakan ilmu yang diajarkan kepada anak untuk sampai tahap menjadi dewasa.

Berdasarkan asal-usul kata, pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pedagogia* yang artinya bergaul dengan anak. Secara sederhana, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengasah dan mengembangkan potensinya sesuai dengan nilai-nilai budaya serta norma yang

berlaku dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian pendidikan pendidikan adalah bagian dari upaya sadar yang senantiasa dikerjakan oleh setiap insan untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kelompok yang diperoleh dalam berbagai pengalaman dalam kehidupan social.

Pendidikan adalah suatu proses yang terencana dan terstruktur untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal. Selain itu, pendidikan juga menjadi upaya kolektif dari masyarakat dan bangsa dalam menyiapkan generasi muda demi keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Secara lebih luas, pendidikan berperan dalam mewujudkan visi yang berlandaskan potensi melalui rangkaian stimulasi terarah guna membentuk individu yang berkompeten dan berprestasi.⁵

Berdasarkan pemahaman ini, pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menggali potensi dalam diri individu

⁴ Ahmad Puadi dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Riau: Dotplus Publisier,2021), 13

⁵ Ani Sopiani, *Sukses Menjadi Pendidik Karakter Siswa*, (Depok:Literatur Media Sukse,2012), 4

melalui pengalaman belajar yang terencana. Proses ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal, yang berlangsung di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hayat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan individu secara maksimal agar di masa depan mereka mampu menjalankan peran hidupnya dengan baik dan efektif.

Dalam pendidikan ada berbagai unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang meliputi tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, isi pendidikan dan lingkungan pendidikan.⁶ Sehingga pendidikan menjadi suatu system yang kompleks dan terintegrasi, dimana setiap unsur saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi arah utamanya yang hendak dicapai, sedangkan kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perpaduan semua unsur ini, pendidikan dapat

⁶ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),24

berjalan secara optimal untuk membentuk individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

2. Bentuk-bentuk Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur utama, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur yang terstruktur dan berjenjang, mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas. Adapun ciri-ciri dalam pendidikan informal yaitu: memiliki kurikulum yang terstruktur, memiliki persyaratan materi yang digunakan bersifat akademik serta tenaga pengajar memiliki kualifikasi tertentu.⁷

Sedangkan pendidikan non formal dan informal adalah pendidikan diluar jalur persekolahan yang notabene dikenal pendidikan masyarakat. Pendidikan ini merupakan sebuah proses pendidikan komunal menuju pemberdayaan baik individu, maupun tingkat kolektif. Ini mengakui komunitas pendidikan

⁷ Chelsi Yuliana dkk, *Pengantar ilmu pendidikan*, (Jambi: Sonpedia Publising Indoensia, 2024), 91

sebagai gerakan katalisator perubahan social dan tidak hanya sebaga layanan.⁸

Dengan demikian pendidikan ini bersifat fleksibel dan kontekstual serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya.

3. Pendidikan dalam konteks social

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat yang bersifat bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan tetapi juga alat untuk membentuk karakter individu dan menanamkan nilai-nilai social yang berguna bagi kehidupan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks sosial ada beberapa tujuan pendidikan yaitu sebagai berikut:

⁸ Soedijarto dkk, Model Pendidikan Era Indonesia Emas (Jakarta Selatan: Damera Pres,2024), 271

a. Membentuk individu yang berkualitas

Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, memiliki kompetensi akademik maupun keterampilan hidup, serta siap berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan juga adalah bagian dari proses pemberdayaan individu agar mampu memahami perannya dalam kehidupan sosial dan mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai bidang kehidupan.⁹

Dengan demikian pendidikan dapat menjadikan seseorang dapat memahami perannya dalam kehidupan sosial dan mengembangkan potensinya secara optimal dalam berbagai bidang.

b. Menciptakan masyarakat yang beradab

Pendidikan berperan dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, serta pendidikan harus

⁹ Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 45

berorientasi pada pembangunan karakter dan kebudayaan bangsa-bangsa.¹⁰

Dengan demikian pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga, mewariskan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan harus berorientasi pada pembangunan karakter dan kebudayaan bangsa agar dapat menciptakan generasi yang beridentitas kuat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri.

c. Meningkatkan kesadaran sosial

Melalui pendidikan, individu dapat memahami berbagai persoalan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pendidikan juga mendorong terciptanya warga negara yang memiliki kesadaran kritis dan peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya.¹¹

Dengan demikian pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman individu terhadap berbagai persoalan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, hak asasi

¹⁰ K.H. Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1962) ,22

¹¹ Anwar, S, *Pendidikan dan Kesadaran Sosial*, (Bandung: Alfabeta 2017), 73

manusia, dan demokrasi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran kritis, peduli terhadap isu-isu sosial, dan siap berperan aktif dalam perubahan sosial yang positif.

d. Mengurangi ketimpangan sosial

Akses pendidikan yang merata berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.¹²

Akses pendidikan yang merata merupakan faktor kunci dalam menciptakan keadilan sosial dengan membuka peluang yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Dengan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan sosial,

¹² Mulyasa.E , *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 155

memperkuat kohesi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan serta berkeadilan.

e. Mempersiapkan partisipasi sosial

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui proses pendidikan, seseorang memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hukum, serta tata kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Selain itu, pendidikan membekali individu dengan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.¹³

Dengan kata lain bahwa pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap isu-isu sosial, dan mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat dan negara.

¹³ Sudjana, N. (2004), *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 98

4. Peran pendidikan dalam membentuk karakter dan kesadaran politik

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui proses pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga nilai-nilai moral, etika, serta pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ada 3 (tiga) peran penting pendidikan dalam membentuk karakter dan kesadaran politik yaitu:

a. Membentuk Karakter Individu

Pendidikan bertujuan untuk membangun karakter yang kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum, individu dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja sama, dan kepedulian sosial. Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mengutamakan

pembentukan watak dan kepribadian, yang mencerminkan identitas bangsa dan budaya yang luhur.¹⁴

Dengan demikian, individu yang terdidik akan memiliki moralitas yang baik dan mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Meningkatkan kesadaran politik

Kesadaran politik merupakan aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi. Pendidikan membantu individu memahami sistem pemerintahan, proses politik, serta hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kesadaran politik adalah pemahaman dan keterlibatan individu dalam sistem politik yang berlaku di suatu Negara.¹⁵ Pendidikan membantu individu memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, peran warga negara dalam politik, serta hak dan kewajiban dalam demokrasi.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan meningkatkan kesadaran politik. Melalui pendidikan karakter, seseorang dapat

¹⁴ Ki Hadjar Dewantara, (1962). *Bagian Pertama: Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1962), 15

¹⁵ Gunawan. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 102

mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Sementara itu, pendidikan politik membantu masyarakat memahami sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Pendidikan juga menjadi alat pemberdayaan yang dapat meningkatkan partisipasi politik, menciptakan pemimpin yang berintegritas, serta mengurangi praktik politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif harus terus dikembangkan agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik.

B. Defenisi Politik

1. Pengertian politik

Politik sebagai sebuah konsep memiliki akar yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Secara asal usul kata, istilah politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*", yang berarti kota atau negara-kota. Dalam konteks Yunani Kuno, polis bukan sekadar kota dalam arti fisik, tetapi

juga mencerminkan komunitas yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan warganya.¹⁶

Politik awalnya hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi seiring waktu berkembang menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, politik memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, dan demokratisasi. Politik juga berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Oleh karena itu, memahami politik sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Seiring berjalannya waktu konsep politik mengalami perkembangan makna dan pemahaman yang lebih luas. Beberapa tokoh penting dalam sejarah pemikiran politik memberikan perspektif yang berbeda mengenai politik diantaranya:

a. Plato (427-347 SM)

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), 12

Dalam bukunya *The Republic*, Plato mengartikan politik sebagai upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat melalui sistem pemerintahan yang ideal. Ia memperkenalkan konsep negara yang dipimpin oleh *philosopher king*, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dan moralitas tinggi untuk menegakkan keadilan.¹⁷

b. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles, murid Plato, memberikan definisi politik yang lebih realistis dalam bukunya *Politics*. Ia menyebut manusia sebagai *zoon politikon* atau makhluk politik, yang berarti manusia secara alami hidup dalam suatu komunitas politik dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosialnya.¹⁸ Politik menurut Aristoteles adalah usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*) melalui pengelolaan negara yang baik.

c. Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Dalam bukunya *The Prince*, Machiavelli melihat politik sebagai seni mempertahankan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa politik tidak selalu harus mengikuti prinsip moral, tetapi lebih kepada

¹⁷ Andrew Heywood, *Politics*, (New York: Palgrave Macmillan 2013), 15

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008),12

strategi dan cara untuk memperoleh serta mempertahankan kekuasaan.¹⁹

2. Politik sebagai proses pengambilan keputusan

Politik dalam pengambilan keputusan dapat di pahami sebagai proses pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Politik tidak hanya terbatas pada pemerintahan, tetapi juga mencakup interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam menentukan kebijakan publik.

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut²⁰. Hal ini berarti bahwa politik berperan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga mencakup bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.

¹⁹ Soetomo, *Politik dan Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press 2012), 78

²⁰ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 15

Dalam proses pengambilan keputusan politik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar kebijakan yang dibuat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan dalam pengambilan keputusan politik meliputi :

- a. Identifikasi masalah. Pemerintah atau aktor politik lainnya mengidentifikasi masalah yang membutuhkan penyelesaian sehingga dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan politik dalam dilakukan dengan baik serta tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
- b. Perumusan kebijakan. Solusi atas masalah yang telah diidentifikasi mulai dirancang dan dibahas dalam lembaga yang memiliki wewenang.
- c. Pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasar pada persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan secara matang dan disetujui secara bersama oleh lembaga yang memiliki wewenang sehingga menghasilkan keputusan final.
- d. Implementasi kebijakan. Keputusan yang telah dibuat diterapkan dalam masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah.

- e. Revisi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diterapkan dinilai efektivitasnya, dan jika ditemukan kekurangan, dapat direvisi atau disesuaikan.

3. Nilai- Nilai dalam Politik

Politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pengelolaan negara dan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai dalam politik adalah prinsip-prinsip fundamental yang membentuk sistem pemerintahan dan interaksi politik dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, persatuan, serta stabilitas sosial dan politik.

Menurut Miriam Budiardjo, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga mencakup perjuangan dalam mewujudkan nilai-nilai tertentu yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam politik sangat berpengaruh terhadap cara suatu negara dijalankan dan bagaimana keputusan politik dibuat. Dalam politik ada beberapa nilai-nilai yang sangat penting diantaranya:

- a. Nilai demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

politik. Dalam hal ini tentu memperhatikan, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

- b. Nilai keadilan. Nilai keadilan dalam politik mengacu pada prinsip bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
- c. Nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin dalam politik harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas yang mencakup anti korupsi, kolusi dan nepotisme, melayani rakyat dengan adil serta mengedepankan etika politik.

C. Hakikat Pendidikan Politik

1. Defenisi Pendidikan Politik

Pengenalan dasar dalam pendidikan politik mempunyai 2 (dua) makna yang relevan yang terdiri dari kata “pendidikan” dan “politik”. Dua kata yang digabungkan ini menjadi pendidikan politik dibutuhkan pendefenisian secara formal terhadap makna pendidikan dan politik. Secara etimologis, arti pendidikan bersumber dari bahasa Latin, yaitu *educare* berarti melatih. Sehingga pendidikan adalah proses mengupayakan dan menumbuhkan, mematangkan dan menata kelola

serta mengarahkan guna meningkatkan kapasitas dan pengetahuan setiap individu.²¹ Politik merupakan aktifitas yang terbentuk dalam suatu Negara dengan cara menggerakkan system pemerintahan untuk memperoleh suatu tujuan secara bersama.

Pendidikan politik merupakan usaha edukasi yang diterapkan dan dilakukan secara terstruktur untuk menciptakan karakter individu sehingga dapat menjadi bagian yang memenuhi kualitas secara etis atau moral hingga meraih tujuan politik. Pendidikan politik sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan mengedukasi politik rakyat secara cermat sehingga dapat berperan dan terlibat aktif²². Pendidikan politik harus dilakukan secara proporsional dalam system politik Indonesia melalui usaha pemahaman terhadap rakyat atau demokrasi secara berkeadilan social.

Pendidikan politik memiliki makna yang luas, dan tidak hanya sekadar konsep gabungan antara pendidikan dan politik. Secara umum pendidikan politik dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran bagi orang dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memahami dan menjalankan sebagai warga Negara yang

²¹ Nobertus Tri Suswanto Saptadi dkk, *Pendidikan Politik*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka:2023), 1

²² *Ibid*,2

aktif dan bertanggung jawab.²³ Melalui pendidikan politik seseorang didorong mengaktualisasikan dirinya sebagai individu yang memiliki kebebasan berfikir, bersikap dan berpartisipasi, dalam kehidupan politik dan sosial. Selain itu pendidikan politik juga membantu individual memperkuat posisinya sebagai bagian dari masyarakat dan Negara yang sadar akan perannya dalam system demokrasi.

Pendidikan politik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan individu pengetahuan, wawasan, serta keterampilan dalam bidang politik, sehingga mereka mampu berpikir kritis dan menentukan arah hidupnya dengan lebih terstruktur. Selain itu, pendidikan politik juga membentuk individu agar menjadi warga negara yang memiliki keteguhan dalam bersikap, tidak mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya, serta memiliki kesadaran terhadap kondisi diri sendiri dan lingkungan sosialnya.²⁴

Dalam lingkungan akademis, pendidikan politik kerap disamakan dengan sosialisasi politik karena keduanya memiliki makna yang hampir serupa. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai bentuk pendidikan politik dalam cakupan yang lebih terbatas. Istilah lain yang sering

²³ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 9

²⁴ Prabowo, *Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Terpadu dalam Menghadapi IPTEK Milenium III*. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), 5

digunakan untuk menggambarkan pendidikan politik adalah *political forming* dan *politische Bildung*.²⁵

Konsep *forming* mengacu pada upaya membentuk individu agar memiliki kesadaran akan peran dan posisinya dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem politik. Sementara itu, *bildung* menekankan pada proses pembentukan diri yang dilakukan secara mandiri, di mana seseorang secara sadar dan bertanggung jawab mengembangkan pemahaman politiknya serta berperan aktif dalam kehidupan politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan politik mempunyai 3 (tiga nilai) yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.

a. Kognitif

Dalam aspek ini pendidikan politik memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar yang membentuk system politik, termasuk ideologi, pemerintahan, hukum, serta kebijakan publik.²⁶ Individu yang memiliki wawasan politik yang baik dapat memahami bagaimana suatu kebijakan dibuat, siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan serta, bagaimana politik bekerja dalam konteks social dan budaya tertentu.

²⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 13

²⁶ Budiyo, *Pendidikan Politik dalam Masyarakat Demokratis*. (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2017), 45-47

b. Afektif

Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap berbagai isu sosial politik. Individu yang memiliki aspek afektif yang baik akan lebih peka terhadap ketidakadilan, kesenjangan social, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Sikap kritis yang dikembangkan melalui pendidikan politik memungkinkan individu untuk menilai kebijakan secara objektif, tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama²⁷. Sehingga aspek afektif dalam pendidikan politik dapat membentuk persepsi dan sikap yang positif terhadap demokrasi dan hak-hak politik.

c. Aspek Psikomotorik

Pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam berbagai bentuk, baik melalui pemilu, organisasi politik, maupun advokasi kebijakan.²⁸

²⁷ Lester W. Milbrath dan M. L. Goel, *Partisipasi Politik: Bagaimana dan Mengapa Orang Terlibat dalam Politik* (Chicago: Rand McNally, 1977), 112-115

²⁸ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Tidak Ada Pilihan yang Mudah: Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), 89-92

Pendidikan politik yang ideal tidak hanya berhenti pada pemahaman dan kesadaran, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam kehidupan politik. Individu yang aktif secara politik dapat berpartisipasi dalam organisasi social terlibat dalam diskusi kebijak public serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian Hakikat pendidikan politik tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan mengenai sistem politik, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki tiga dimensi utama, yaitu kognitif (pemahaman konsep-konsep politik), afektif (sikap dan nilai-nilai demokratis), serta psikomotorik (partisipasi nyata dalam kegiatan politik).

2. Peran pendidikan Politik dalam kehidupan demokrasi

Demokrasi merupakan system pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses politik baik secara langsung maupun perwakilan. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan masyarakat yang memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam hal ini,

pendidikan memegang peran penting dalam membangun masyarakat yang sadar politik, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokratis. Ada beberapa peran penting pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi yaitu sebagai berikut:

a. Membentuk masyarakat yang kritis dan berpengetahuan

Pendidikan berperan dalam membentuk individu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan mekanisme pemerintahan. Warga Negara yang memahami pendidikan politik akan lebih mampu memahami isu-isu politik dan kebijakan publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.²⁹ Masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi oleh karena memahami perannya sebagai warga Negara yang baik maka tidak akan menimbulkan sikap-sikap yang apati tetap menunjukkan rasa kepedulian terhadap bangsa dan Negara sehingga dalam kebijakan-kebijakan public turut mengambil bahagian untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman.

b. Meningkatkan partisipasi politik

²⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), 35.

Warga Negara yang memiliki akses terhadap pendidikan lebih cenderung berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, diskusi kebijakan dan kegiatan organisasi masyarakat³⁰. Pendidikan membantu meningkatkan kesadaran politik dan membangun rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.

c. Mengembangkan sikap toleransi dan pluralisme

Dalam masyarakat yang beragam pendidikan politik memainkan peran penting dalam menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok. Pendidikan dapat membantu individu menyelesaikan perbedaan demokrasi karena dengan pendidikan yang diterima dapat menjadi masyarakat yang kritis, aktif dan berpikir secara rasional untuk menghargai setiap perbedaan yang ada.

d. Mempersiapkan pemimpin masa depan

Pendidikan berperan penting dalam membentuk calon pemimpin masa depan yang memiliki wawasan, integritas, dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan. Seorang pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik akan lebih memahami

³⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 114.

kebutuhan masyarakat dan dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Pendidikan politik sebagai alat pemberdayaan masyarakat

Pendidikan politik memiliki peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat, karena melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri.³¹

Dengan demikian pendidikan politik diharapkan mampu menumbuhkan dan menciptakan masyarakat yang berdemokrasi dalam berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan social politik.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik individu dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, mengenai system pemerintahan, serta mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan public dan dinamika politik.

³¹ Jefri Anjaini, *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi, Model, dan Inovasi untuk Transformasi Sosial*, (Madium: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), 38

Namun dengan demikian efektifitas pendidikan politik dipengaruhi oleh berbagai factor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana pendidikan politik dapat membentuk individu yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik. Adapun factor-faktornya sebagai berikut:

a. Kualitas kurikulum dan materi pendidikan

Efektifitas pendidikan politik tergantung pada kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang baik harus mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, system politik, serta mekanisme pemilu dan kebijakan publik. Kurikulum tidak hanya bersifat teoritis dan tidak relevan dengan kehidupan nyata, peserta didik akan kesulitan mengaitkan konsep-konsep politik dengan pengalaman mereka sehari-hari.³²

Selain itu, materi pendidikan politik harus netral dan tidak mengandung bias politik karena jika materi yang diajarkan cenderung mengarah pada kelompok tertentu pendidikan politik bisa menjadi alat propaganda buka menjadi sarana pembelajaran yang objektif. Dengan demikian kualitas dan hasil dari pendidikan politik sangat bergantung pada kurikulum serta materi pada pendidikan itu sendiri.

³² Larry Diamond, *Mengembangkan Demokrasi: Menuju Konsolidasi* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 85.

b. Metode pembelajaran yang digunakan

Metode pembelajaran yang digunakan juga sangat berperan penting dalam menentukan efektifitas pendidikan politik. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan seperti diskusi, debat, simulasi pemilu, dan studi kasus, serta dapat dengan metode ceramah. Namun terkadang metode ceramah yang satu arah kadang tidak efektif dan efisien karena tidak ada timbal balik ataupun hanya satu orang yang aktif dalam kegiatan tersebut.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pendidikan politik misalnya simulasi pemilu disekolah maupun universitas, ini dipandang dapat memberikan pengalaman yang nyata tentang proses demokrasi dan bagaimana system politik bekerja.

c. Peran pendidik dan fasilitator

Pendidik sangat menjadi penentu dalam meningkatkan efektifitas pendidikan politik, karena pendidik dan fasilitator dianggap mampu dan memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan politik sehingga pemahaman tentang pendidikan politik dapat di sampaikan ataupun dikemukakan secara benar

sehingga orang yang menerima dan mendengarnya dapat memahami secara jelas tentang arti pendidikan politik itu sendiri.

Namun jika pendidik tidak memiliki wawasan yang luas atau kurang berkompeten maka tidak akan menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis dan independen dalam kehidupan berdemokrasi sehingga akan muncul generasi-generasi yang bersifat apatis atau cuek terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam kehidupan demokrasi.

d. Lingkungan social dan keluarga

Lingkungan social, keluarga dan komunitas sangat berpengaruh besar terhadap efektifitas pendidikan politik. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dan komunitas yang aktif dalam diskusi-diskusi politik cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik dibandingkan mereka yang berasal dari lingkungan yang apatis terhadap politik.

e. Media dan teknologi informasi

Dalam era kemajuan teknologi dan informasi akses terhadap informasi melalui berbagai media social, elektronik dan media cetak sangat membantuk masyarakat memahami isu-isu politik

dengan baik sebab di peroleh dengan muda dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Namun dalam hal ini masyarakat dituntu untuk mampu melihat dan memilah sebuah berita agar yang dapat diterima adalah informasi yang benar buka berita yang tidak benar (*hoaks*). Sehingga jika hal ini terjadi, maka masyarakat bisa membentuk opini yang keliru yang tidak berdasarkan fakta. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu mencakup aspek literasi digital agar masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan tidak benar sehingga memahami politik secara objektif.

D. Kedudukan PAK dalam Pendidikan Politik

1. Defenisi Pak

Pendidikan Agama Kristen ialah usaha secara sengaja yang dilakukan oleh gereja untuk membina semua warga jemaat agar dapat menjadi dewasa dalam iman, pengharapan dan kasih serta dapat melaksanakan tugas dan panggilan sebagai pengikut Kristus. Pendidikan Agama Kristen bertujuan membawa setiap orang, baik tua maupun muda untuk mengenal akan Allah lewat Firman-Nya (Alkitab) dan dapat hidup dalam Yesus Kristus.

Menurut Gereja Kongregasional Evangelikal, Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk membawa individu ke dalam komunitas iman

Kristen, membimbing mereka dalam keyakinan serta panggilan spiritual, agar mereka dapat menerima pengampunan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan baru dari Allah. Dengan sikap penuh syukur dan ketaatan, pendidikan ini juga berperan dalam membentuk pribadi Kristen yang dewasa dan berkomitmen dalam menjalankan panggilannya dengan setia pada Gereja³³. Jadi pendidikan Agama Kristen adalah sebuah didikan yang diberikan kepada setiap individu baik dari keluarga, maupun guru dimanapun ia berada. Melalui pendidikan Agama Kristen yang diberikan tentu akan semakin mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Landasan Alkitabiah

a. Politik dalam Perjanjian Lama

Politik dalam Alkitab Perjanjian Lama mencerminkan bagaimana pemerintahan, hukum, dan kepemimpinan diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam konteks ini, politik tidak hanya mencakup kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan serta tata kelola sosial yang diatur berdasarkan hukum ilahi.

³³ Paulus Lilik Kristanto, *Prinsip dan Praktik Pendidikan Agama Kristen* (Yogyakarta: Andi, 2006), 5

Pada awalnya, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan secara langsung melalui perantara para nabi, hakim, dan imam. Sistem pemerintahan ini disebut sebagai *Teokrasi*, di mana hukum dan kebijakan sosial didasarkan pada perintah Tuhan. Hukum yang diberikan kepada Musa, seperti yang tercantum dalam Keluaran 20:1-21 dan Ulangan 5:1-22, menjadi dasar dalam kehidupan politik dan sosial bangsa Israel. Teokrasi dalam Perjanjian Lama menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemimpin tertinggi, sementara pemimpin manusia bertindak sebagai wakil-Nya untuk menegakkan keadilan dan hukum-Nya.³⁴

Politik dalam Perjanjian Lama tidak hanya mencerminkan struktur pemerintahan bangsa Israel, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan, hukum, dan keadilan yang tetap relevan hingga saat ini. Peran Tuhan sebagai pemimpin tertinggi, peralihan dari teokrasi ke monarki, serta peran hukum dan para nabi dalam mengawasi kebijakan politik menjadi bagian integral dari dinamika politik Israel pada masa itu

b. Politik dalam Perjanjian Baru

³⁴ Walton, J.H, *Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament*, (Baker Academic,2006),112.

Alkitab Perjanjian Baru mencerminkan dinamika politik yang kompleks pada abad pertama Masehi, terutama dalam konteks pemerintahan Kekaisaran Romawi yang menguasai wilayah Israel. Politik dalam Perjanjian Baru tidak hanya berhubungan dengan sistem pemerintahan, tetapi juga dengan bagaimana Yesus Kristus dan para murid-Nya merespons situasi politik yang ada.

Politik dalam Perjanjian Baru dapat dikaji melalui beberapa aspek utama, yaitu:

a. Sistem pemerintahan pada masa Perjanjian Baru

Pada masa Yesus, wilayah Yudea berada di bawah Kekaisaran Romawi, yang dipimpin oleh kaisar sebagai penguasa tertinggi. Di tingkat lokal, pemerintahan dijalankan oleh gubernur Romawi dan raja klien, seperti Herodes Agung dan keturunannya. Salah satu gubernur yang paling dikenal dalam Alkitab adalah Pontius Pilatus, yang berkuasa dari tahun 26-36 M dan berperan dalam pengadilan Yesus (Matius 27:11-26).³⁵

Dinamika politik di Israel pada masa Perjanjian Baru sangat dipengaruhi oleh ketegangan antara harapan mesianis bangsa

³⁵ Wright, N.T., *The New Testament and the People of God*. (Fortress Press, 1992), 47-48

Yahudi dan otoritas Romawi yang ingin mempertahankan kekuasaannya.

b. Sikap Yesus Terhadap Politik

Yesus Kristus tidak datang sebagai pemimpin politik dalam arti konvensional, tetapi ajaran-Nya berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan politik. Salah satu peristiwa politik penting dalam pelayanan Yesus adalah ketika orang Farisi bertanya apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Yesus menjawab: *“Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah”* (Matius 22:21).

Jawaban ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menentang pemerintah secara langsung, tetapi juga menegaskan bahwa otoritas politik tidak boleh menggantikan otoritas Tuhan, pernyataan ini menegaskan pemisahan antara kewajiban politik dan kewajiban spiritual.³⁶

Selain itu, ketika Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, Ia menyatakan bahwa kerajaan-Nya bukan dari dunia ini (Yohanes 18:36). Hal ini menegaskan bahwa misi utama Yesus adalah

³⁶ Barclay, W. *The Gospel of Matthew, Volume* (Westminster John Knox Press, 2001), 127

membawa kerajaan Allah, bukan mendirikan kerajaan politik di bumi.

3. Tujuan Pendidikan Agama Kristen

Tujuan Pendidikan Agama Kristen ialah mendidik semua putera-puteri gereja agar mereka dilibatkan dalam penelaan Alkitab secara cerdas sebagaimana dibimbing oleh Roh Kudus, diajar untuk mengangkat pelayanan serta diperlengkapi mengabdikan seluruh aspek hidup kepada Allah dalam setiap kehidupan.³⁷ Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Yesus Kristus agar dapat hidup didalamnya serta bertanggung jawab terhadap imannya kepada Yesus Kristus yang tercermin dalam perjalanann kehidupan setiap hari.

Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk mengarahkan setiap orang menuju pengenalan akan Yesus Kristus, mendekati diri kepada Yesus Kristus serta meningkatkan potensi spiritual dan memperlengkapi setiap insan yang percaya kepadanya melauli doa, pujian serta Firman Tuhan.

2. Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Pendidikan Politik

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik individu dan masyarakat. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, nilai-

³⁷ Robert R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: Gunung Mulia, 2005), 414

nilai iman Kristen dapat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan politik. Pendidikan Agama Kristen tidak hanya berfokus pada pembentukan iman pribadi, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab politik yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kasih.

Menurut Eben Nuban Timo, Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral Kristiani yang dapat memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik³⁸. Dengan demikian, pendidikan ini memiliki peran dalam membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki integritas dalam dunia politik. Ada beberapa peran penting PAK dalam pendidikan politik diantaranya:

- a. Pendidikan Agama Kristen sebagai Fondasi Etika Politik.
Politik sering kali diidentikkan dengan perebutan kekuasaan, strategi kepentingan, dan bahkan praktik yang tidak etis. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Kristen memberikan nilai-nilai etika yang membimbing individu untuk terlibat dalam politik dengan cara yang benar dan bertanggung jawab yang menekankan pada prinsip kebenaran dan kejujuran, keadilan sosial serta kasih dan kepedulian.

³⁸ Timo, Eben Nuban, *Pendidikan Agama Kristen dalam Konteks Masyarakat Indonesia.*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 89

- b. Pendidikan Agama Kristen dalam Membentuk Kesadaran Politik. Kesadaran politik tidak hanya berbicara tentang pemahaman terhadap sistem pemerintahan, tetapi juga bagaimana seseorang melihat perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Agama Kristen membantu umat untuk memahami bahwa mereka mempunyai jiwa panggilan dalam politik sebagai bagian dari tanggung jawab iman.
- c. Pendidikan Agama Kristen dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Politik. Salah satu aspek penting dalam politik adalah kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki dasar iman yang kuat akan memimpin dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pendidikan Agama Kristen memberikan landasan bagi setiap orang supaya menjadi pemimpin yang baik melalui tentang pemahaman kepemimpinan yang melayani, membangun karakter yang kuat, dan mengajarkan membangun tanggung jawab sosial.